

Pertemuan dalam rangka konsultasi DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Dinas Perkebunan Prov.Sumatera Utara



Pertemuan dilaksanakan dalam rangka konsultasi /diskusi antara Komisi B DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang membidang Pertanian dan Perkebunan. konsultasi/diskusi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan ya berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah (BKP), Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana-dana lainnya. Konsultasi dilaksanakan bersama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan masukan dan saran berkenaan dengan masalah tentang bantuan keuangan dimaksud.



Yang hadir pada pertemuan ini Ketua Komisi B DPRD Kab.Tapanuli Tengah, Sekretaris Komisi B DPRD Kab.Tapanuli Tengah , Anggota Komisi B DPRD Kab.Tapanuli Tengah, Staf Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Tengah, Pejabat Eselon III dan IV di Lingkup Disbun.Provsu.

Kegiatan pertemuan diadakan di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sum.Utara Jalan

Jend.Besar Dr.Abdul Haris Nasution No.24 Medan pada hari Kamis / 24 Januari 2019 pertemuan ini diwakili oleh Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara ibu **Ir.Lies Handayani, M.MA.**

Hasil Kesimpulan dari pertemuan ini adalah

1. DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah merasa bahwasanya kinerja daerah masih tertinggal dengan ketidaktahuan adanya Bantuan Keuangan Pemerintah dan Dana Bagi Hasil serta dana-dana lainnya
2. Kabupaten penerima alokasi anggaran yang sesuai dengan komoditi unggulan daerah akan bertanggung jawab apabila ada alokasi dana atas pelaksanaan kegiatan dan wajib melaksanakan koordinasi berlanjut secara intensif dengan bidang terkait di provinsi untuk menindaklanjuti apa yang telah disepakati dalam pertemuan. Adakan pembinaan dan pengawasan ke lapangan tapi bukan mencari kesalahan dan ciptakan perimbangan dan usahakan meminimalisir masalah.
3. Untuk kabupaten penerima alokasi anggaran maka proposal harus akurat dan up -todate yang berisikan tentang calon petani penerima bantuan dan yang diusulkan haruslah petani yang menangani usaha tani komoditi yang dibantu dengan catatan tergabung dalam Kelompok Tani sehingga dapat dipantau keberadaan petaninya.
4. Proposal Usulan beras dari kelompok tani disampaikan ke Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sebagai rancangan awal rencana kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.



konsultasi /diskusi antara Komisi B DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah